

ABSTRAK

Regga Gurkami (2024), Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Status Macet di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ternate, dengan Komisi Pembimbing **Rusdin Alauddin dan Anshar.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro hingga status Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate, serta tanggungjawab perusahaan asuransi dalam penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro dengan Status Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada perilaku (*behavior*) yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyaluran kredit yang syarat pengajuannya tidak terpenuhi sejak awal, tidak dimonitoring dengan baik penggunaan dana hasil kredit usaha ini, sehingga dana yang disalurkan tidak digunakan untuk menambah modal usahanya. Usaha debitur yang menjadi sumber pengembalian kredit sudah tidak lagi berjalan sehingga tidak ada daya kemampuan membayar, gagalnya klaim dari penjamin kredit yaitu Asuransi Jamkrindo dan askrindo. Menjadi penyebab Terjadinya kredit KUR macet di Bank BTN. Upaya yang telah dilakukan adalah: *Rescheduling*, (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali), *Restructuring* (Penataan Kembali), ini adalah upaya yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet di Bank BTN. Tanggungjawab Perusahaan Asuransi dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Macet Di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate. Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjaminan kredit yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Perum Jamkrindo) (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2015). Cara kerjanya yaitu pemerintah memberikan penjaminan atas resiko KUR sebesar 70% sedangkan sisanya yaitu 30% ditanggung oleh Bank Pelaksana. Pada prakteknya dari 12 yang menjadi sampel penelitian ini 8 diantaranya gagal klaim asuransi. Penyebab gagal klaim oleh perusahaan asuransi dikarenakan Terdapat beberapa persyaratan administrasi yang tidak dapat dilengkapi oleh petugas Bank, Terdapat perbedaan nilai polis asuransi dari pihak bank dan pihak asuransi sehingga belum berhasil untuk dilakukan klaim asuransi.

Kata Kunci: Analisis Hukum; Kredit Usaha Rakyat; Status Macet

ABSTRACT

Regga Gurkami (2024), *Legal Analysis of The Settlement of Micro People's Business Loans with Bad Status at PT Bank Tabungan Negara Ternate Branch Office*, with the supervisory commission **Rusdin Alauddin and Anshar.**

This research aims to analyze the implementation of Micro People's Business Credit (KUR) up to Loss Status at PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Ternate Branch Office, as well as the responsibility of insurance companies in resolving Micro People's Business Credit with Loss Status at PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Ternate Branch Office. This research uses a type of empirical legal research, namely research conducted with a focus on behavior that is adopted and developed in society. This research is a type of empirical research because in this research the researcher has described in detail and in depth a situation or phenomenon of the research object. The results of this research show that credit distribution whose application requirements were not met from the start, was not properly monitored on the use of funds resulting from this business credit, so that the funds disbursed were not used to increase business capital. The debtor's business which is the source of credit repayment is no longer running so there is no ability to pay, claims from credit guarantors, namely Jamkrindo Insurance and Askrindo, have failed. This is the cause of bad KUR credit at Bank BTN. The efforts that have been made are: Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, these are the efforts that have been made to resolve bad credit at Bank BTN. Responsibility of Insurance Companies in Resolving Bad Credit for Micro People's Businesses at PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Ternate Branch Office. This credit is guaranteed by the government through a credit guarantee institution, namely PT. Indonesian Credit Insurance (hereinafter referred to as Askrindo) and Indonesian Credit Guarantee Public Company (hereinafter referred to as Perum Jamkrindo) (Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, 2015). The way it works is that the government provides a guarantee for KUR risks of 70% while the remaining 30% is borne by the Implementing Bank. In practice, of the 12 samples in this study, 8 of them failed to make insurance claims. The reason the claim failed by the insurance company was because there were several administrative requirements that could not be completed by bank officers. There was a difference in the value of the insurance policy from the bank and the insurance company so that the insurance claim had not been successful.

Keywords : Legal Analysis, Mikro People's Business Loans, Bad Status